

Keterangan LHKPN Bapak Tugas Ratmono

Sehubungan dengan adanya pergantian Komisaris Utama Bio Farma, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-193/MBU/08/2024 pada tanggal 5 Agustus 2024. Maka saat ini Komisaris Utama Bio Farma dijabat oleh Bapak Tugas Ratmono. Sejak tahun 2023 dan sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Bio Farma, Bapak Tugas Ratmono tidak dikenakan kewajiban membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikarenakan pada periode tersebut, beliau tidak mengampu jabatan yang diwajibkan untuk membuat LHKPN.

Keterangan LHKPN Bapak Batara Imanuel Sirait

Sehubungan dengan adanya pergantian Jajaran Komisaris Bio Farma, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-193/MBU/08/2024 pada tanggal 5 Agustus 2024, telah ditetapkan Bapak Batara Imanuel Sirait sebagai Komisaris Independen Bio Farma. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Bio Farma, Bapak Batara Imanuel Sirait tidak dikenakan kewajiban membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikarenakan beliau belum mengampu jabatan yang diwajibkan untuk membuat LHKPN.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Juni 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT INDOFARMA, TBK.
UNIT KERJA : KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIZAR YAMANIE
2. Jabatan : KOMISARIS INDEPENDEN
3. NHK : 156288

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 21.316.717.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/272 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.389.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 946 m2/446 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.294.920.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/304 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.064.760.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 3769 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.012.710.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.555.327.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.100.000.000

1. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. MOBIL, BMW BMW Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.051.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 2.200.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.653.973.327

F. HARTA LAINNYA

Rp. 569.000.000

Sub Total

Rp. 29.890.690.327

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 29.890.690.327

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK KUSNAINI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 673160

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.030.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/114 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 985.000.000
2. Tanah Seluas 518 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 252.500.000
3. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 107.500.000
4. Tanah Seluas 747 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 280.000.000
5. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 275.000.000
6. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **611.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000



5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
525.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	764.610.074
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	502.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.958.410.074
III. HUTANG	Rp.	404.170.445
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.554.239.629

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BIO FARMA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONI DWI SUSANTO
2. Jabatan : KOMISARIS
3. NHK : 169157

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 173.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2018, HADIAH Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALTIS SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI W 175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 254.500.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.095.992.391

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.398.492.391

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.398.492.391

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.